

**RENCANA KERJA
(RENJA)
Tahun 2020**



**DINAS SOSIAL
PEMERINTAH KOTA SERANG**

**Jln. TB Suwandi No. 03 Lingkar Selatan
Serang - Banten**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang memuat kebijakan, rencana program, kegiatan dan kebutuhan anggaran indikatif kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pada tahun sebelumnya.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2008-2025;
- 11 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014 –2018
- 12 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang;
- 13 Peraturan Walikota Serang Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Serang;
- 14 Peraturan Walikota Serang Nomor Tahun 2019 Tentang RKPD Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Tahun 2020 ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan renja ini adalah :

- 1.3.1 Menjabarkan rencana strategis Dinas Sosial tahun 2018 - 2023.
- 1.3.2 Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
- 1.3.3 Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan OPD.
- 1.3.4 Menciptakan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya organisasi.
- 1.3.5 Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ketahun dan keselarasan program, kegiatan OPD dengan program dan kegiatan pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2020 sebagai berikut:

1.4.1 BAB I PENDAHULUAN

- 1.4.1.1 Latar Belakang
- 1.4.1.2 Landasan Hukum
- 1.4.1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4.1.4 Sistematika Penulisan

1.4.2 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJATAHUN LALU.

- 1.4.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial
- 1.4.2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD
- 1.4.2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 1.4.2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1.4.3 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1.4.3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 1.4.3.2 Program dan Kegiatan OPD Tahun2020

1.5 BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Serang terdiri dari satu sekretariat, empat bidang, dan dua unit puskesmas. Hasil Renja Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2018 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Secara rinci hasil kegiatan tahun 2018 diuraikan di bawah ini.

2.1.1 Laporan Realisasi Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun 2018 Dinas Sosial Kota Serang telah melaksanakan 12 Program yang terdiri dari 46 Kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.916.037.213,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 3.699.133.453,- dan anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 5.216.903.760,-

Realisasi Belanja Dinas Sosial Kota Serang pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Bulan Desember adalah sebesar Rp 7.968.517.948,- atau mencapai 89,37 % yang terdiri dari Realisasi BTL sebesar Rp3.135.869.248,- atau 84,77 % dan BL sebesar Rp4.832.648.700,- atau 92,63 %, dengan rincian : realisasi diatas 90 % sebanyak 29 kegiatan, realisasi antara 80 % - 90 % sebanyak 10 kegiatan, realisasi antara 70 % - 80 % sebanyak 3 kegiatan , realisasi antara 60 % - 70 % sebanyak 3 kegiatan dan realisasi di bawah 60 % sebanyak 1 kegiatan.

Adapun uraian kegiatan beserta capaian indikator outputnya adalah sebagai berikut:

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 11 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari anggaran sebesar Rp3.150.000,- terealisasi Rp3.150.000,- atau 100 % dengan output lembar Meterai (benda pos);
- 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari anggaran sebesar Rp. 62.745.000,- terealisasi Rp55.650.000,- atau 97,31 % dengan output 12 bulan;
- 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dari anggaran sebesar Rp. 29.290.000,- terealisasi Rp.26.059.900,- atau 88,97% dengan output terbitnya STNK kendaraan roda 4 sebanyak 10 unit dan roda 2 sebanyak 22 unit;
- 1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dari anggaran sebesar Rp.91.363.000,- terealisasi Rp.90.563.000,- atau 99,12% dengan output 12 Bulan;

- 1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, dari anggaran sebesar Rp. 44.912.700,- terealisasi Rp.35.037.000,- atau 78,01% dengan output 12 bulan;
- 1.6 Penyediaan Barang Cetakan atau Penggandaan, dari anggaran sebesar Rp.64.330.000,- terealisasi Rp.57.837.000,- atau 89,91 % dengan output 12 bulan;
- 1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari anggaran sebesar Rp.19.135.000,- terealisasi Rp.19.135.000,- atau 100 % dengan output 12 bulan;
- 1.8 Penyediaan Bahan Bacaan atau Peraturan Perundang-undangan, dari anggaran sebesar Rp.7.854.000,- terealisasi Rp.5.236.000,- atau 66,67 % dengan output 12 bulan;
- 1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman, dari anggaran sebesar Rp.39.495.000,- terealisasi Rp 35.042.250,- atau 88,73 % dengan output 12 bulan;
- 1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah, dari anggaran sebesar Rp. 452.430.000,- terealisasi Rp. 451.571.650,- atau 99,81% dengan output 12 bulan;
- 1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dari anggaran sebesar Rp. 37.300.000,- terealisasi Rp.37.300.000,- atau 100% dengan output 12 bulan;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 7 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dari anggaran sebesar Rp.44.000.000,- terealisasi Rp. 36.870.000,- atau 83,80 %, dengan output 4 AC dan 4 Printer%;
- 2.2 Pengadaan Mebeleur, dari anggaran sebesar Rp.35.000.000,- terealisasi Rp.34.340.000,- atau 98,11%, dengan output 1 Sofa, 10 Meja, 5 Kursi;
- 2.4 Pengadaan Gedung Kantor, dari anggaran sebesar Rp.389.440.000,- terealisasi Rp. 330.000.000,- atau 84,74 %, dengan output sewa gedung sebanyak 6 gedung;
- 2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dari anggaran sebesar Rp.244.057.000,- terealisasi Rp. 241.555.850,- atau 98,98 %, dengan output 10 unit roda 4 dan 17 unit roda 2;
- 2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dari anggaran sebesar Rp. 46.470.000,- terealisasi Rp.12.525.000,- atau 26,95%, dengan output 6 gedung;
- 2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dari anggaran sebesar Rp. 21.900.000,- terealisasi Rp.21.900.000,- atau 100%, dengan output 12 bulan;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 3.1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu, dari anggaran sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi Rp.46.085.000,- atau 92,17 %, dengan output 25 stel PDH, 25 stel baju batik, 25 stel baju olahraga;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

4.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dari anggaran sebesar Rp.39.260.000,- terealisasi Rp. 39.260.000,- atau 100 %, dengan output 2 Kegiatan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 7 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari anggaran sebesar Rp.67.070.00,- terealisasi Rp.60.250.000,- atau 89,83% dengan output 4 Dok (LKPJ, PK IKU, LPPD, LKjIP);

5.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dari anggaran sebesar Rp.48.120.000,- terealisasi Rp.35.526.000,- atau 73,83% dengan output 3 dokumen terealisasi 3 dokumen;

5.3 Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp.115.980.000,- terealisasi Rp.111.380.000,- atau 96,03 % dengan Output 6 dokumen.

5.4 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, dari anggaran sebesar Rp. 48.890.000,- terealisasi Rp.38.501.000,- atau 78,75% dengan output 2 dokumen;

5.5 Penyediaan Data, Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi SKPD, dari anggaran sebesar Rp.547.060.000,- terealisasi Rp.546.550.000,- atau 99,91 % dengan output 12 bulan;

5.6 Penyusunan Rencana Kerja SKPD, dari anggaran sebesar Rp.73.590.000,- terealisasi Rp. 69.590.000,- atau 94,56% dengan output 2 Dokumen;

5.7 Penyusunan Rencana Strategis SKPD, dari anggaran sebesar Rp.48.590.000,- terealisasi Rp.43.437.000,- atau 89,39% dengan output 1 dokumen.

6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terdiri dari 6 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

6.1 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Tugas pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya, dari anggaran sebesar Rp.59.530.000,- terealisasi Rp.59.530.000,- atau 100 % dengan output 6 Kegiatan%.

6.2 Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin, dari anggaran sebesar Rp. 145.410.000,- terealisasi Rp.142.010.00,- atau 97,66 % dengan output 1 kegiatan dan bansos kube 6 kelompok;

6.3 Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin, dari anggaran sebesar Rp. 244.350.000,- terealisasi Rp.238.410.000,- atau 97,57 % dengan output 1 kegiatan dan bansos kube 11 kelompok;

- 6.4 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, dari anggaran sebesar Rp.86.530.000,- terealisasi Rp. 84.500.000,- atau 97,65 %, dengan output 1 KegiatanUnit RTLH;
- 6.5 Identifikasi dan analisis penanganan fakir miskin dari anggaran sebesar Rp. 49.530.000,- terealisasi Rp.40.680.000,- atau 82,13 % dengan output 1 kegiatan dan data 20.492 kk;
- 6.6 Sistem layanan dan rujukan terpadu dari anggaran sebesar Rp.283.086.250,- terealisasi Rp.191.206.250,- atau 67,54 % dengan output 4 kegiatan.
- 7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari 5 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**
- 7.1 Pelayanan dan Perlindungan Sosial, hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan anak, dari anggaran sebesar Rp.48.890.000,- terealisasi Rp. 48.290.000,- atau 98,77 % dengan output 2 kegiatan dan bansos;
- 7.2 Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal, dari anggaran sebesar Rp.30.105.000,- terealisasi Rp. 30.066.000,- atau 99,87 % dengan output 2 kegiatan;
- 7.3 Koordinasi dan Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan, dari anggaran sebesar Rp.146.550.000,- terealisasi Rp.139,950.000,- atau 95,50% dengan output 12 kegiatan;
- 7.4 Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa , dari anggaran sebesar Rp.238.800.000,- terealisasi Rp. 236.734.000,- atau 99,14 % dengan output 1 Bufferstock dan 6 kegiatan;
- 7.5 Pelayanan dan perlindungan social bagi Lansia dari anggaran sebesar Rp.148.890.00,- terealisasi Rp.125.390.000,- atau 84,22% dengan output 3 kegiatan;
- 8. Program Pembinaan Anak Terlantar, terdiri dari 1 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**
- 8.1 Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar, dari anggaran sebesar Rp. 118.890.000,- terealisasi sebesar Rp.117.290.000,- atau 98,65% dengan output 4 Kegiatan;
- 9. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, terdiri dari 1 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**
- 9.1 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma, dari anggaran sebesar Rp.49.630.000,- terealisasi Rp.49.630.000,- atau 100% dengan output 2 Kegiatan.

10. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo, terdiri dari 1 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

10.1 Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik, dari anggaran sebesar Rp. 49.650.000,- terealisasi Rp. 49.650.000,- atau 100% dengan output 1 Kegiatan.

11. Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya), terdiri dari 1 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

11.1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial, dari anggaran sebesar Rp. 74.200.000,- terealisasi Rp.47.500.000,- atau 64,02% dengan output 1 Kegiatan.

12. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari 6 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

12.1 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha, dari anggaran sebesar Rp.27.650.000,- terealisasi Rp. 27.650.000,- atau 100% dengan output 1 Kegiatan;

12.2 Peningkatan Jenjang kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, dari anggaran sebesar Rp.39.650.000,- terealisasi Rp.34.400.000,- atau 86,76% dengan output 1 Kegiatan;

12.3 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dari anggaran sebesar Rp.48.250.000,- terealisasi Rp.47.650.000,- atau 98,76% dengan output 2 kegiatan;

12.4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlwanan dan Keprintisan, dari anggaran sebesar Rp.148.590.000,- terealisasi Rp.148.341.000,- atau 99,83% dengan output 5 kegiatan;

12.5 Pendataan dan Updating Data PMKS dan PSKS, dari anggaran sebesar Rp.489.735.810,- terealisasi Rp.487.835.800,- atau 99,61% dengan output 3 kegiatan;

12.6 Pembinaan social bagi pelaku-pelaku usaha kesejahteraan social, dari anggaran sebesar Rp.24.650.000,- terealisasi Rp. 24.650.000,- atau 100% dengan output 2 kegiatan.

2.1.2 Laporan realisasi kegiatan dan anggaran sampai dengan Triwulan II TA. 2019

Dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 Dinas Sosial Kota Serang melaksanakan 7 Program dan 33 Kegiatan. Pagu Anggaran Dinas Sosial Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 8.442.943.676,-. Yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp.4.654.072.587,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 6.408.740.000 dan sampai dengan Triwulan II ini baru terealisasi Rp 2.892.519.283,- atau 26,15%, yaitu realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp1.716.489.850,- atau 36,88% dan realisasi belanja langsung sebesar Rp1.304.904.833,- atau 18,35 % ,-. Dengan rincian: realisasi antara 80 % - 100 %

masih 0 kegiatan, realisasi antara 70 % - 80 % masih 0 kegiatan , realisasi antara 60 % - 70 % sebanyak 1 Kegiatan dan realisasi di bawah 60 % sebanyak 24 kegiatan. Sisanya masih ada 8 kegiatan yang belum terealisasi.

Adapun uraian kegiatan beserta capaian indikator outputnya adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan dan peningkatan kapasitas aparatur, terdiri dari 8 kegiatan sebagai berikut :

- 1.1 Pelayanan administrasi perkantoran, dari rencana anggaran sebesar Rp.318.851.266,- baru terealisasi Rp.90.841.183,- atau 28,49% dengan output 12 bulan;
- 1.2 Pengadaan sarana dan prasarana kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.595.000.000,- baru terealisasi Rp.295.000.000,- atau 49,58 % dengan output sewa gedung 6 gedung;
- 1.3 Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.315.000.000,- baru terealisasi Rp.69.297.250,- atau 22 % dengan output 12 bulan;
- 1.4 Peningkatan kapasitas aparatur, dari rencana anggaran sebesar Rp.140.000.000,- belum terealisasi dengan output 3 kegiatan;
- 1.5 Penyediaan dokumentasi,informatika dan komunikasi OPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- baru terealisasi sebesar Rp. 31.500.000,- atau 21% dengan output 12 bulan;
- 1.6 Pengelolaan barang milik daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- baru terealisasi sebesar Rp.6.250.000,- atau 8,33% dengan output 1 dokumen;
- 1.7 Penyediaan makanan dan minuman, dari rencana anggaran sebesar Rp.40.000.000,- baru terealisasi Rp.6.048.000,- atau 15,12% dengan output 12 bulan;
- 1.8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.231.250.000,- baru terealisasi Rp.61.260.000,- atau 26,49% dengan output 12 bulan.

2. Program Pengelolaan dan pelaporan keuangan terdiri dari 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 2.1 Penyusunan pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran, dari rencana anggaran sebesar Rp.67.500.000,- Belum Terealisasi dengan output 3 dokumen.

3. Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan pelaporan Capaian Kinerja, terdiri dari 5 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 3.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- baru terealisasi Rp.44.587.000,- atau 59,45% dengan output 3 dokumen;
- 3.2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perangkat daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.55.000.000,- belum terealisasi dengan output 2 dokumen;

- 3.3 Pengendalian dan evaluasi kinerja, dari rencana anggaran sebesar Rp.55.000.000,- belum terealisasi dengan output 4 dokumen;
- 3.4 Penyusunan pelaporan capaian kinerja tahunan perangkat daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.87.725.000,- baru terealisasi Rp. 34.421.000,- atau 39,24% dengan output 4 dokumen;
- 3.5 Penyusunan data dan profil perangkat daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.63.923.734,- belum terealisasi dengan output 25 buku profil.
- 4. Program Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari 5 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**
 - 4.1 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Tugas pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya, dari rencana anggaran sebesar Rp.146.000.000,- baru terealisasi Rp.25.961.000,- atau 17,78 % dengan output 4 kegiatan;
 - 4.2 Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin, dari rencana anggaran sebesar Rp. 259.340.000,- baru terealisasi Rp.3.000.000,- atau 1,16% dengan output 1 kegiatan dan 10 kelompok KUBE FM;
 - 4.3 Fasilitasi manajemen usaha bagi fakir miskin, dari rencana anggaran sebesar Rp. 239.340.000,- belum terealisasi dengan output 1 kegiatan dan 10 kelompok KUBE PRSE,;
 - 4.4 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, dari rencana anggaran sebesar Rp.87.300.000,- baru terealisasi Rp.10.500.000,- atau 12,03% dengan output 1 kegiatan dan 149 RTLH;
 - 4.5 Identifikasi dan analisis data Fakir Miskin dari rencana anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- baru terealisasi Rp.10.500.000 atau 12,03% dengan output data 10 kube fm, 10 kube prse ,149 RTLH, dan16.390 KPM.
- 5. Program Perlindungan dan jaminan Sosial, terdiri dari 3 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:**
 - 5.1 Perlindungan social bagi korban bencana alam dan sosial dari rencana anggaran sebesar Rp.300.000.000,- baru terealisasi Rp.92.010.000 atau 30,67% dengan output 4 kegiatan dan 200 bufferstock;
 - 5.2 Jaminan social keluarga dari rencana anggaran sebesar Rp.200.000.000,- baru terealisasi Rp.48.465.000 atau 24,23% dengan output 4 kegiatan;
 - 5.3 Updating data kemiskinan, PMKS dan PSKS, dari anggaran sebesar Rp.471.597.000,- baru terealisasi Rp.102.800.000 atau 21,80% dengan output 4 kegiatan.

6. Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial, terdiri dari 4 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 6.1 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan social, dari rencana anggaran sebesar Rp.63.400.000,- baru terealisasi Rp.44.150.000 atau 69,64% dengan output 1 kegiatan;
- 6.2 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan social masyarakat, dari rencana anggaran sebesar Rp.100.750.000,- baru terealisasi Rp.3.000.000 atau 2,98% dengan output 2 kegiatan;
- 6.3 Peningkatan sarana dan prasarana kepahlawanan dan keprintisan, dari rencana anggaran sebesar Rp.150.000.000,- baru terealisasi Rp.38.308.000 atau 25,54% dengan output 4 kegiatan dan 200 buku profil pahlawan;
- 6.4 Pelaksanaan KIE konselling dan kampanye social bagi PMKS, dari rencana anggaran sebesar Rp.263.120.000,- baru terealisasi Rp.59.250.000 atau 22,52% dengan output 13 kegiatan.

7. Program Rehabilitasi Sosial, terdiri dari 7 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 7.1 Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi lansia, dari rencana anggaran sebesar Rp.384.143.000,- baru terealisasi Rp.25.735.000 atau 6,70% dengan output 10 kegiatan;
- 7.2 Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak disabilitas dan anak korban Napza, dari rencana anggaran sebesar Rp.150.000.000,- belum terealisasi dengan output 4 kegiatan;
- 7.3 Penyusunan data di analisis permasalahan anak terlantar, dari rencana anggaran sebesar Rp.63.000.000,- baru terealisasi Rp.3.000.000 atau 4,76% dengan output 4 kegiatan;
- 7.4 Pengembangan bakat dan kreatifitas anak, dari rencana anggaran sebesar Rp.123.800.000,- belum terealisasi dengan output 4 kegiatan;
- 7.5 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat, dari rencana anggaran sebesar Rp.474.000.000,- baru terealisasi Rp.43.131.000 atau 9,10% dengan output 7 kegiatan;
- 7.6 Pelayanan dan perlindungan social, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dari rencana anggaran sebesar Rp.186.200.000,- baru terealisasi Rp.3.000.000 atau 1,61% dengan output 4 kegiatan;
- 7.7 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial, dari rencana anggaran sebesar Rp.432.500.000,- baru terealisasi Rp. 11.610.000,- atau 2,68% dengan output 6 kegiatan.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perencanaan suatu program/ kegiatan, memonitoring hasil pelaksanaan, mengevaluasi dampak yang terjadi pada target kinerja serta menunjang indikator program nasional yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Dinas Sosial Kota Serang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang sosial dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial memiliki sasaran kerja utama yaitu jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberdayakan dan di berikan bantuan sosial. Berdasarkan data yang diperoleh dari pelaksana teknis kegiatan di lapangan dan dimasukkan kedalam tabel realisasi dan pelaporan, maka dapat diberikan analisa kinerja Dinas Sosial baru terealisasi sebesar 26,15% sampai dengan Triwulan II TA 2019.

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penentuan isu-isu strategis ini Dinas Sosial Kota Serang melihat dari berbagai sisi baik di internal ataupun eksternal dimana isu-isu ini digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan Dinas Sosial Kota Serang lebih baik. Adapun isu-isu strategis itu adalah:

- a. Meningkatkan Penanganan PMKS melalui Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial disertai dengan Profesionalitas, Pendayagunaan SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan Pengembangan Iptek. Ukuran ataupun indikator atas profesionalisme adalah bagaimana pelaksanaan dilapangan ataupun pekerjaan sesuai standar prosedur kerja yang telah ditetapkan. Kredibilitas dari Dinas Sosial Kota Serang sendiri sebagai sebuah lembaga dituntut untuk dapat bekerja secara profesional adalah sebuah keharusan untuk mendapatkan kepercayaan dari publik, karena sifat dan pekerjaan dari Dinas Sosial ini adalah pelayanan publik. Profesionalisme ini sangat tergantung dari pendayagunaan dan pengoptimalisasian pegawai di lingkungan Dinas Sosial Kota Serang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Peningkatan dalam pembaharuan (*updating*) data PMKS harus diselaraskan dengan baik. Oleh karenanya pendayagunaan SDM kesejahteraan sosial dengan perkembangan iptek haruslah sejalan dan selaras guna mendukung pada program profesionalisme itu sendiri.
- b. Meningkatkan Pemberdayaan PSKS melalui Pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial. Potensi lain yang perlu dikembangkan adalah sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, organisasi dan manajemen yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Dengan fondasi (nilai) dan lantai (SDM) itu terbina dengan

baik, maka pilar-pilar kokoh yang menjadi tugas pokok penyelenggara kesejahteraan sosial yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan memberi arti bagi penurunan angka kemiskinan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial Kota Serang membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak baik terpisah dalam tahapan penyusunan Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kajian Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Sosial Kota Serang merupakan Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani urusan sosial. Pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Sosial merupakan pembangunan yang bersifat non fisik karena bukan merupakan pembangunan infrastruktur maupun gedung yang bisa dirasakan langsung pemanfaatannya oleh masyarakat. Pada usulan perencanaan kegiatan tahun 2020, Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, serta sesuai dengan tugas dan fungsi OPD terhadap program/kegiatan pada Tahun 2020 yang mencakup aspek pelayanan meningkatkan kemandirian bagi PMKS dan PSKS sehingga diperoleh masukan yang konstruktif sebagai bagian kontribusi dari masyarakat kepada Pemerintah Kota Serang agar pelayanan kemandirian bagi PMKS dan PSKS menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah melalui kementerian sosial RI Maupun kebijakan Pembangunan Daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Dinas Sosial Provinsi Banten merupakan salah satu acuan bagi penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Serang. Hal ini dilakukan agar program/ kegiatan Dinas Sosial Kota Serang tetap linier dengan program/ kegiatan Dinas Sosial Provinsi sehingga ketika pemerintah pusat menghendaki capaian dari program/ kegiatan yang disusun oleh Kementerian Sosial, pemerintah kabupaten dapat melaporkan sesuai dengan breakdown program/ kegiatan tersebut. Dinas Sosial Provinsi telah menetapkan sasaran strategis yang dimuat dalam renstra Pemerintah Provinsi, yaitu:

1. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
2. Meningkatnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dinas Sosial Kota Serang berkewajiban menjalankan komitmen Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang mengacu pada Visi dan Misi Kota Serang yang tercantum pada RPJMD Kota Serang tahun 2018-2023. Dimana Visi Walikota adalah “ Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan berbudaya”. Sedangkan Misi Kota Serang adalah:

1. Memperkuat Peradaban Berbasis Nilai-nilai Kemanusiaan
2. Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdaya Saing
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Dinas Sosial mengemban Misi Walikota periode 2018-2023 yang ketiga (3) yaitu : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdaya Saing.

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Sosial Kota Serang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
Meningkatnya PMKS yang mendapat pemberdayaan dan bantuan sosial	Meningkatkan PMKS yang mendapatkan bantuan sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan dan bantuan sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial

3.3 Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil kinerja Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2018, kinerja pelayanan, isu- isu penting tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi, maka disusunlah program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Serang tahun 2020.

1. Program Pelayanan Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

- A. Pelayanan administrasi perkantoran
- B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- C. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- D. Penyediaan Dokumentasi, informatika, dan komunikasi OPD
- E. Pengelola Barang Milik Daerah.
- F. Penyediaan Makanan dan Minuman
- G. Rapat –Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.

2. Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan

- A. Penyusunan pelaporan keuangan triwulan dan semesteran

3. Program Peningkatan perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan capaian kinerja

- A. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- B. Penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah
- C. Pengendalian dan evaluasi kinerja
- D. Penyusunan pelaporan capaian kinerja tahunan perangkat daerah
- E. Penyusunan data dan profil perangkat daerah

4. Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan fakir miskin

- A. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Tugas pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya.

- B. Fasilitasi Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin.
- C. Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin.
- D. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.
- E. Identifikasi dan analisis penanganan Fakir Miskin.

5. Program perlindungan dan Jaminan sosial

- A. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial
- B. Jaminan Sosial keluarga
- C. Updating data kemiskinan PMKS dan PSKS

6. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

- A. Peningkatan jenjang kerjasama pelaku- pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
- B. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
- C. Peningkatan sarana dan prasarana kepelawanan dan keperintisan
- D. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

7. Program rehabilitasi sosial

- A. Pelayanan dan perlindungan sosial bagi lansia.
- B. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi antar termasuk anjal, anak disabilitas dan anak korban NAPZA.
- C. Penyusunan data dianalisis permasalahan anak terlantar.
- D. Pengembangan bakat dan kreatifitas anak.
- E. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat
- F. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban exploitasi, perdagangan perempuan dan anak.
- G. Pendidikan dan pelatihan berusaha bagi exs penyandang penyakit sosial.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil KUA PPAS terhadap Rencana kerja Tahun 2020, Maka disusunlah Tabel Rencana Kerja dan PendanaanTA.2020 serta Prakiraan Maju Tahun 2021 Dinas Sosial Kota Serang sebagai berikut :

Tabel 4. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2020 serta Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Ctt Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1106.01	Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	12 Bulan	Dinas Sosial	100%	1.865.101.266	APBD	
001	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan			318.851.266		
002	Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	3 motor, 20 mabeler,6 gedung, 6 unit peralatan kantor			595.000.000		
003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	6 gedung, 27 kendaraan			315.000.000		
009	Peningkatan Kapasitas Aparatur	3 kegiatan, 70 orang			140.000.000		
010	Penyediaan Dokumentasi,Informatika dan Komunikasi OPD	12 Bulan			150.000.000		
011	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen			75.000.000		

012	Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan			40.000.000		
013	Rapat-Rapat kordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah.	12 Bulan			281.250.000		
1106.02	Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	12 Bulan	Dinas Sosial	100%	67.500.000	APBD	
001	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan dan Semesteran.	3 dokumen			67.500.000		
1106.03	Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian kinerja	12 Bulan	Dinas Sosial	100%	336.648.734	APBD	
001	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah	1 kegiatan, 3 dokumen			75.000.000		
002	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen			55.000.000		
003	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	4 dokumen			55.000.000		
004	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahun Perangkat Daerah	4 dokumen			87.725.000		
005	Penyusunan Data dan Profil perangkat Kerja	25 buku dan CD			63.923.734		
1106.11	Program Penanganan Fakir Miskin	12 Bulan	Dinas Sosial	100%	776.980.000	APBD	
001	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya	4 kegiatan, 16.390 KPM			146.000.000		
002	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	7 kelompok, 2 petugas pendamping			259.340.000		
003	Fasilitasi manajemen usaha bagi fakir miskin	7 kelompok, 1 kegiatan, 2 petugas pendamping			239.340.000		
004	Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	1 kegiatan, 122 RTLH, 25 P2WKSS			87.300.000		
0055	Identifikasi dan Analisis data Fakir Miskin	7 kelompok, 7 kelompok, 145 unit, 16.390 KPM			45.000.000		
1106.12	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	12 Bulan	Dinas Sosial	100%	971.597.000	APBD	
001	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	40 orang (tagana, KSB, psikososial) 288 paket bufferstock, 100 orang ekspedisi kemanusiaan			300.000.000		
002	Jaminan Sosial Keluarga	40 orang (PKH, sosialisasi PKH, sosialisasi Jamsosratu) 50 orang (evaluasi PKH, evaluasi Jamsosratu)			200.000.000		
003	Updating Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS	Petugas Bintek 77 orang, Bintek PBI, JKN 120 orang, Bintek updating PMKS, PSKS 67			471.597.000		

		orang, evaluasi PBI,JKN,PMKS,PSKS 80 orang.					
1106.13	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	12 Bulan	Dinas Sosial	100%	577.270.000	APBD	
001	Peningkatan Jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	1 kegiatan, 50 PKS			63.400.000		
002	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	1 kegiatan 28 LKS, 1 kegiatan 24 PSKS berprestasi, 1 kegiatan 30 LK3, 3 LKS bantuan			100.750.000		
003	Peningkatan sarana dan prasarana kepahlawanan dan keperintisan	4 kegiatan(hari pahlawan, pemeliharaan TMPN ciceri, olimpiade kepahlawanan, hari pahlawan nasional) 200 buku profil pahlawan			150.000.000		
004	Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)	11 kegiatan SLRT dan Puskesmas, 1 kegiatan kampanye PMKS, 1 kegiatan UGB dan PUB, 1 kegiatan pameran			263.120.000		
1106.13	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	12 Bulan	Dinas Sosial	100%	1.813.643.000	APBD	
001	Pelayanan dan perlindungan Sosial bagi Lansia	2 kegiatan senam lansia, 1 kegiatan bansos sembako lansia, 1 kegiatan rutin lansia, 2 kegiatan pembinaan petugas lansia,Tk Kec dan Kel. 1 kegiatan bantuan pelayanan kesehatan lansia.			384.143.000		
002	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi antar termasuk Anjal, Anak Disabilitas dan anak korban Napza	1 kegiatan(penguatan kapasitas building anak PMKS, Anak jalanan dikirim ke PSBR jakarta, Pembinaan PSA, kewirausahaan Anjal.			150.000.000		
003	Penyusunan Data di analisis permasalahan Anak Terlantar	1 kegiatan penguatan LKSA, pendataan 100 anak terlantar, 1 kegiatan COTA.			63.000.000		
004	Pengembangan Bakat dan Kreatifitas Anak	3 kegiatan(lomba minat bakat Tk Prov, UU no 35 Th 2014, bantuan perlengkapan sekolah antar)			123.800.000		
005	Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat	4 kegiatan(pelatihan tata boga disabilitas 30 orang, pembinaan petugas pendamping 11 orang, pemberian alat bantu kursi roda 45 pcs, tongkat 15 pcs , alat bantu dengar 2 pcs)			474.000.000		
006	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi korban Eksploitasi,perdagangan perempuan dan anak	23 penerima sembako, 30 korban kekerasan home visit, 20 orang pelatihan tata boga.			1986.200.000		
007	Pendidikan dan Pelatihan Berusaha bagi Eks Penyandang penyakit Sosial	70 orang pemberian bahan makanan pokok panti, 40 orang penjangkaran penyakit sosial, 10 orang keterampilan perbengkelan			432.500.000		
JUMLAH					6.408.740.000		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Serang TA.2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2018-2023. Penyusunannya telah mengacu pada dokumen RPJMD Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023. Penjabaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Serang dalam Tahun 2020.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SERANG**

Drs. H. MOCH POPPY NOPRIADI, M.Si
NIP.19721112 199203 1 001